

BAB II

PANDANGAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN

A. Kontestasi Perempuan dalam Perspektif Islam

Islam telah menghapuskan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dalam pandangan Islam adalah makhluk yang memiliki potensi yang sama seperti apa yang dimiliki laki-laki. Keberadaannya dipandang sebagai mitra sejajar dengan laki-laki secara harmonis. Tak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, baik secara individu (hamba Allah), anggota keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat, begitu pula dalam hak dan kewajiban. Jikapun ada perbedaan, itu hanya akibat fungsi dan tugas utama yang diberikan oleh Allah SWT kepada masing-masing jenis kelamin yang berbeda, sehingga perbedaan ini tidak berdampak pada merasa tingginya status dan peran diantara keduanya. Laki-laki maupun perempuan keduanya saling membutuhkan dan keterkaitan serta mempunyai tugas yang sama penting, baik dalam domain rumah tangga maupun sosial.

Di zaman sekarang anggapan tentang peran gender adalah pembahasan antara pemisahan peran antara kaum adam (laki-laki) dan kaum hawa (perempuan), sehingga dengan adanya pemahaman yang demikian mengakibatkan lahirnya pola pikir bahwa laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, adanya kelas superior dan inferior, adanya manusia kelas satu dan kelas dua, bahkan hingga hari ini perempuan selalu disandingkan dengan hal-hal domestic. Namun yang perlu kita ketahui persoalan gender adalah perbedaan jenis kelamin yang bukan biologis (seks) dan bukan pula kodrat Tuhan, sehingga secara permanen dan universal tentunya berbeda, maka dari itu gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan atas konstruksi sosial. Satu perbedaan

yang sebenarnya bukan kodrat Tuhan tetapi perbedaan yang sengaja diciptakan oleh manusia melalui proses sosial budaya yang amat panjang.

Perbedaan gender yang dipublikasikan membuat kesan dan wacana kalau peran gender tradisional, seperti merawat, medidik dan mengasuh dipandang rendah jika dibandingkan dengan peran gender laki-laki yang lebih mempublikasikan perannya dalam ruang-ruang publik. Laki-laki dan perempuan pada dasarnya memiliki bobot yang sama. Oleh karena itu tidak boleh ada pihak yang secara apriori bisa dikatakan lebih berat kewajiban dan haknya terhadap yang lain. Anggapan bahwa peran produksi dan mencari nafkah lebih berat dari beban reproduksi (melahirkan, mengandung dan menyusui) tidak serta merta kita terima¹. Dengan demikian kondisi tersebut menimbulkan pemisahan dan tarik-menarik yang sulit dipisahkan antara sistem budaya dan agama yang memberikan kekuatan besar bagi terciptanya subordinasi dan ketertindasan kaum perempuan. Para ulama sepakat bahwa tidak mungkin agama yang diturunkan Allah SWT mengandung ketidakadilan atau bahkan diskriminasi bagi pihak perempuan itu sendiri. Kepemimpinan perempuan dalam hukum islam akan menjelaskan bagaimana sesungguhnya yang mesti dilakukan terhadap permasalahan jender sekaligus menjelaskan secara detail bagaimana upaya konkrit mengatasi permasalahan gender yang dipahami salah oleh orang banyak.

a) Al-Qur'an dan Pemimpin Perempuan

Sejak 15 abad silam, al-Qur'an telah menghapuskan berbagai macam diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Perempuan diberikan hak yang sama sebagaimana hak yang diberikan kepada laki-laki, diantaranya masalah kepemimpinan. Faktor yang dijadikan pertimbangan

¹ Masdar F. Masdudi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, edisi Revisi, cet, Ke-1 (Bandung: Mizan 2000), hal.197.

dalam hal ini hanyalah kemampuannya dan terpenuhinya kriteria untuk menjadi seorang pemimpin. Ruang publik bukanlah monopoli kaum laki-laki, tetapi juga bisa di isi oleh kaum perempuan jika mampu memenuhi kriteria yang ada. Masalah ini disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 71.

يَأْمُرُونَ بَعْضَ أَوْلِيَآءِ بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الْمَدَكَرِ عَنِ وَيَذْهَبُونَ بِالْمَعْرُوفِ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَدِيرَ حَمُهُمْ أَوْلِيكَ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَيُطِيعُونَ الزَّكَاةَ
حَكِيمٌ عَزِيزٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong (pemimpin) bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka taan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Mereka itu akan dberi Rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
(QS At-Taubah ; 71)

Dalam ayat tersebut Allah menggunakan kata “*auliya*” (pemimpin), itu bukan hanya ditunjukkan kepada pihak lai-laki saja, tetapi keduanya (laki-laki dan perempuan) secara bersamaan. Sesuai dengan ayat ini perempuan juga mempunyai

hak dan boleh berkontestasi dalam ranah menjadi seorang pemimpin (politik). Dalam kita Al-Maraghi dan tafsir Al-Manar, kata “*auliya*” mencakup “*wali*” yang artinya solidaritas, penolong, dan kasih sayang.²

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an tidak melarang perempuan untuk memasuki beberapa profesi, dokter, dosen, guru dan bahkan menjadi kepala negara sekalipun dengan syarat dia mendapat restu dan izin dari suaminya jika sudah menikah, supaya tidak mendatangkan hal yang negative pada dirinya dan urusan rumah tangganya tidak terbengkalai.³

Disisi lain dalam hal ini, ada beberapa ulama yang berbeda pendapat terkait boleh atau tidaknya perempuan menjadi *top leader* (perdana menteri atau kepala negara) dan *hakim*. *Jumhur* ulama berpendapat bahwa tidak boleh perempuan menjadi *top leader* atau hakim, berdasarkan firman Allah SWT. :

وَبِمَا بَعْضٍ عَلَىٰ بَعْضِهِمُ اللَّهُ فَضَّلَٰ بِمَا التَّسَاءَىٰ عَلَىٰ قَوْمُونَ لِرِّجَالُ
وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْغَيْبِ حَفِظَتْ قُنُوتٌ فَالصَّلِحَاتُ أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنْفُقُوا

² Ahmad Mushthafa, Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Al-Qahirah, Mushtafa Al-Baby Al-Halaby Wa Auladuh*, 1382 H/1963 M, juz 10 cet, Ke-3, 159. Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Juz 11, t.t., 1375, 626.

³ Al-Auyuthy, *Al-Jami Al-Shagir*, Jilid II, cet. Ke-1 (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Islamiyah,1968), 314.

فَإِنَّ وَاضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي وَاهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نُسُوزَهُنَّ تَخَافُونَ
كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ إِنَّ سَبِيلًا عَلَيْهِنَّ تَبِعُوا فَلَا أَطَعْتُمْ

“kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lainnya (perempuan), karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu, mereka perempuan yang shaleha, ia yang taat kepada Allah SWT. Lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena itu Allah telah memelihara (mereka), perempuan-perempuan yang khawatir nusyuznya, maka nasihatilah mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (QS An-Nisa : 34)

Hadis dari Abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ahmad, Nasa’I, dan At-Tirmizdi, bahwa Rasulullah bersabda :

Tidak akan bahagia suatu kaum yang mengangkat sebagai pemimpin mereka seorang perempuan.

Menurut Jawad Mughniyah dalam tafsir Al-Kasyif, maksud ayat tersebut bukanlah menciptakan perbedaan yang menganggap perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, ayat tersebut ditujukan pada laki-laki yang menjadi seorang suami dan perempuan yang menjadi seorang istri. Keduanya rukun dalam kehidupan yang saling melengkapi. Ayat ini

ditujukan untuk kepemimpinan dalam berumah tangga, dalam hal seorang suaminya memimpin istrinya. Bukan menjadi penguasa atau diktator.⁴

Fatimah Mernissi menanggapi hadis Abu Bakrah dengan mengatakan bahwa kita bertanya apa yang mendorong Abi Bakrah berpuluh-puluh tahun setelah kalimat itu diucapkan oleh Nabi, untuk menggali Kembali hadis itu dari relung-relung ingatannya? Apakah ia mempunyai kepentingan pribadi yang harus dikemukakan atau semata-mata sebagai kenangan spiritual terhadap Nabi? Jelas, Abu Bakrah mempergunakan hadis ini untuk mencari muka pada pihak yang berkuasa.

Kemudian, mari kita telaah lagi dalam sejarah perang Unta yang menjadi sikap oportunistik Abu Bakrah lebih nyata lagi, pada waktu itu sangat banyak sahabat yang tidak ikut menyertai perang tersebut. Perang antara Ali Bin Abi Thalib dan Ummul Mukminin Aisyah dikatakan hanyalah sebuah perang yang bisa memecah persaudaraan dan memecah belah umat serta berpotensi menjadikan mereka saling bermusuhan. Meskipun sama-sama mempertahankan diri atas prinsip yang diajarkan Nabi Muhammad Saw untuk tidak ikut serta dalam peperangan tersebut yang dapat menyebabkan pertikaian antar kelompok masyarakat. Hanya Abu Bakrah yang menjadikan jenis kelamin sebagai salah satu penolakan untuk tidak ikut serta dalam peperangan tersebut, sesudah Aisyah kalah.⁵

⁴ Jawad Mughniyah, Muhammad. *Tafsir A-kasyif*, Juz II, cet. Ke-1, (Beirut : Dar Ilmi Li al-Malayin, 1968), hal. 314.

⁵ Mernissi, Fatimah dan Rif'at Hasan, *Setara di Hadapan Allah*, cet. Ke-1 (Yogyakarta : LSPPA, Yayasan Prakarsa, 1995), 210-211.

Jika Abu Bakrah mengatakan bahwa tidak akan bahagia suatu kaum jika dipimpin seorang perempuan sebagai pemimpin, maka Al-Qur'an mengatakan yang sebaliknya. Yaitu berang dari kisah ratu Balqis yang memimpin negeri Saba'. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Saba' ayat 15 :



مِنْ كُلِّوَاهِٓ وَشِمَالِ يَمِينٍ عَنِ جَنَّاتٍ أَيْهٖ مَسْكِنِهِمْ فِي لِسْبَا كَانَ لَقَدْ
عَفُورٌ وَرَبُّ طَيِّبَةٌ بَلَدَةٌ لَهُ وَاشْكُرُوا رَبِّكُمْ رَزَقَ

Artinya: Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) ditempat kediaman mereka yaitu dua kebun disebalah kanan dan kiri. Makanlah olehmu dari rezeki (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya (negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) dalam Tuhan Yang Maha Pengampun. (QS. Saba' : 15)

SUMATERA UTARA MEDAN

Info yang diberikan dalam penjelasan Al-Qur'an dan kisah-kisah yang tertulis bahwa diberitakan kepada Nabi Sulaiman a.s bahwa ada sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang perempuan yang bernama Ratu Balqis yang mana Ratu Balqis ini memiliki singgah sana yang sangat mewah beraneka macam hiasan dan mutiara yang tidak dapat dihitung banyaknya. Ratu Balqis memiliki kekuasaan dan harta benda yang banyak, namun dia dan kaumnya menyembah matahari. Hal ini tercantum dalam dalam Al-Qur'an Surah An-Naml ayat 23-24

عَظِيمٍ عَرْشٌ وَلَهَا شَيْءٌ كُلٌّ مِنْ وَأُوتِيَتْ تَمْلِكُهُمْ أَمْرًا وَجَدْتُ إِيَّ

وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَرَبِّينَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ
السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ

Artinya : Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahkan segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang benar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, setan telah menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah) sehingga mereka tidak mendapat petunjuk (QS. An-Naml : 23-24)

Mendengar hal tersebut Nabi Sulaiman a.s berkata sebagaimana yang Allah sematkan kisahnya dalam Al-Qur'an surah An-Naml ayat 27 dan 28 berikut ini :

الْكَذِبِينَ مِنْ كُنْتَ أَمْ أَصَدَقْتَ سَنَنْظُرُ قَالَ

يَرْجِعُونَ مَاذَا فَاَنْظُرْ عَنْهُمْ تَوَلَّى ثُمَّ إِلَيْهِمْ فَأَلْقَاهُ هَذَا بِكِتَابِي إِذْهَبْ

Artinya : Berkata Sulaiman akan kami lihat, apa kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu

jatuhkan kepada mereka, lalu perhatikanlah apa yang akan mereka bicarakan (QS. An-Naml : 27-28)

Setelah Nabi Sulaiman a.s menyampaikan hal tersebut kepada Ratu Balqis, ia berkata sebagaimana disinggung dalam firman Allah SWT :

كَرِيمٍ كَتَبُ إِلَى أَلْقَىٰ إِنِّي الْمَلُؤَا يَايُهَا قَالَتْ
الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ وَأَنَّهُ سَلِيمِنَ مِنْ إِنَّهُ
مُسْلِمِينَ وَآتُونِي عَلَى تَعْلُوا إِلَّا
تَشْهَدُونَ حَتَّى أَمْرًا قَاطِعَةً كُنْتُ مَا أَمْرِي فِي أَفْتُونِي الْمَلُؤَا يَايُهَا قَالَتْ

Artinya : Berkata ia (Balqis), hai pembesar-pembesar sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat berharga. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya (isi)nya : Dengan (menyebut) nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Berkata Balqis : “Hai pembesar-besar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan pun sebelum kamu berada dalam majeli (ku)” (QS An-Naml : 29-32)

Dari ayat tersebut tampak jelas betapa bijaksananya Ratu Balqis dan kedalam pemikirannya. Bahkan dengan niat dan usaha yang baik untuk mengungkapkan apa yang belum ia ketahui tentang Nabi Sulaiman a.s sehingga ia mengadakan musyawarah untuk meminta pendapat dan pandangan dari mereka. Dan dalam musyawarah tersebut Ratu Balqis dan pasukannya mengatakan bahwa mereka siap tempur secara fisik, mental dan logistik. Hal ini dikisahkan Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

مَاذَا فَاَنْظُرِي الْاَيْتِكَ وَالْاَمْرُ شَدِيْدٌ بَاسٍ وَّ اَوْلُوْا قُوَّةً اَوْلُوْا نَحْنُ قَالُوْا
تَاْمُرِيْنَ

Artinya : Mereka menjawab, “Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan). Dan keputusan berada ditanganmu, maka perintahkanlah apa yang kamu perintahkan (kepada kami) (QS An-naml : 33)

Dengan firasat Ratu Balqis yang sangat kuat, dengan demikian ia tahu bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang Nabi, karena Nabi Sulaiman menolak pemberian mewah yang diberikan oleh Ratu Balqis melalui utusannya. Penolakan hadiah tersebut dikisahkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

اَتَاكُمْ مِّمَّا خَيْرُ اللّٰهِ اَتَانِيْ فَمَا بِمَالٍ اَتْمِدُوْنَ قَالَ سُلَيْمٰنَ جَآءَ فَلَْمَا
تَفَرَّحُوْنَ بِهَدِيَّتِكُمْ اَنْتُمْ بَلَّ

وَهُمْ أَذِلَّةٌ مِنْهَا وَأَلْخُرَجَتْهُمْ بِهَا لَهُمْ قَبْلَ لَا بِجُنُودٍ فَلَأَنْتَبَهُمْ إِلَيْهِمْ ارْجِعْ
صَاغِرُونَ

Artinya : Tatkala urusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta ? Sesungguhnya apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik dari apa yang diberikanNya kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka sungguh kami akan mendatangi mereka dengan balatentara yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti akan mengusir mereka dari negeri (Saba') dengan terhina dan mereka menjadi (terawan-tawanan) yang tidak berharga” (QS An-Naml :36-37).

Kemudian, Sulaiman bertanya kepada para pembesar di kerajaannya, siapa yang dapat mengangkat dan memindahkan singgasananya Ratu Balqis sebelum ia dan rombongannya dating berserah diri. Hal ini dikisahkan dalam All-Qur'an :

مُسْلِمِينَ يَأْتُونِي أَنْ قَبْلَ بَعْرُ شَهَا يَأْتِينِي أَيُّكُمْ الْمَلَأَ أَيُّهَا يَا قَالَ
عَلَيْهِ وَإِي مَقَامِكَ مِنْ تَقْوَمَ أَنْ قَبْلَ بِهِ آتِيكَ أَنَا الْجِنَّ مِنْ عَفْرِيْتُ قَالَ
أَمِينٌ لَقْوِي

إِلَيْكَ يَرْتَدُّ أَنْ قَبْلَ بِهِ آتِيكَ أَنَا الْكِتَابِ مِنْ عِلْمٍ عِنْدَهُ الَّذِي قَالَ
أَمْ أَشْكُرُ لِيَبْلُؤُنِي رَبِّي فَضْلٍ مِنْ هَذَا قَالَ عِنْدَهُ مُسْتَقِرًّا رَأَهُ فَلَمَّا طَرَفَاكَ
كَرِيمٍ عَنِّي رَبِّي فَإِنَّ كَفَرَ وَمَنْ لِنَفْسِهِ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا شَكَرَ وَمَنْ أَكْفُرُ

Artinya : Berkata Sulaiman, “Hai pembesar-pembesar, siapakah diantara kamu sekalian yang sanggup membawa sanggasana kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai sebagai orang yang berserah diri” Berkata Ifrit (yang cerdas) dari golongan jin, “Aku akan datang kepadamu dnegan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu: sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawa lagi dapat dipercaya”. “Berkata seorang yang mempunyai ilmu dari Al-Kitab”. Aku akan membawa singgasana itu kepdamu sebelum matamu berkedip”. Maka tatkala Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak dihadapannya, ia pun berkata, “ini termasuk karunia Tuhanku utnuk mencoba aku apakah aku bersyukur dan mengingkari (akan nikmatNya). Dan barangsiapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia” (QS An-Naml : 38-40).

Tantangan yang diberikan Nabi Sulaiman kepada jin Ifrid (yang cerdas). Untuk melihat bagaimana respon Ratu Balqis dan rombongannya terdahap Maha Kuasa Allah dalam memindahkan kerajaan nya dalam

sekejab mata dengan merubah beberapa bagian singgasana untuk melihat apakah Ratu Balqis masih tetap mengenal kerajaan Saba'nya atau tidak. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Qur'an:

يَهْتَدُونَ لَا الَّذِينَ مِنْ تَكُونُ أَمْ أَتَهْتَدِي نَنْظُرُ عَرْشَهَا لَهَا نَكِرُوا قَالَ

Artinya : Dia berkata, “ubahlah baginya singgasana : maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenal(nya). (QS. An-Naml: 41)

Ratu Balqis setelah sampai dikerajaan Nabi Sulaiman, terkejut melihat persis seperti singgasananya. Dengan rasa heran dan takjub Ratu Balqis percaya bahwa ini singgasananya walaupun ada sedikit perbedaan namun dalam pikirannya ia (Balqis) percaya bahwa yang memindahkan dan membuat seperti ini bukan orang biasa. Tetapi suatu keajaiban. Walaupun demikian, ketika Ratu Balqis ditanyakan “Apakah itu singgasanamu?” dengan jawaban yang cerdas dan diplomatis “Seakan-akan singgasana ini singgasanaku.” Kisah ini digambarkan dalam Al-Qur'an.

مِنَ الْعِلْمِ وَأُوْتِينَا هُوَ كَأَنَّهُ قَالَتْ عَرْشُكَ أَهَكَذَا قِيلَ جَاءَتْ فَاَلَمَّا

مُسْلِمِينَ وَكُنَّا قَبْلَهَا

كَافِرِينَ قَوْمٍ مِّنْ كَانَتْ إِتِّهَا اللَّهُ دُونَ مِّنْ تَعْبُدُ كَانَتْ مَا وَصَدَّهَا

Artinya : Dan ketika Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya, “serupa inikah singgasanamu?” Dia menjawab “seakan-akan singgasana ini singgasanaku, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri” Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah, mencegahnya (untuk melahirkan keislamannya), karena sesungguhnya dia dahulunya termasuk orang-orang kafir (QS An-Naml : 42-43)

Kisah ini menunjukkan betapa hebatnya pemikiran Ratu Balqis dalam memimpin dan dalam mengambil setiap tindakan. Bahkan ketika melihat betapa hebatnya Kuasa Tuhan Nabi Sulaiman dengan memindahkan singgasananya dan menciptakan istana megah nan mewah yang luarbiasa indahny. Dalam ketakjuban itu, Ratu Balqis tidak menyerah begitu saja kepada Nabi Sulaiman, tetapi ia juga mengatakan “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan Semesta Alam. Ini adalah sebuah ungkapan yang hanya dapat diucapkan oleh orang yang cerdas dikala ia dalam kondisi terdesak, ia tidak langsung mengakui kebesaran lawannya, tetapi ia “merangkul” lawannya dan menundukkan diri kepada Zatnya yang lebih tinggi daripada Sulaiman. Hal ini sebagaimana di ilustrasikan dalam firman Allah SWT. :

وَكَشَفَتْ لُجَّةً حَسِبْتَهُ رَأْتَهُ فَلََمَّا^ط الصَّرْحَ ادْخُلِي لَهَا قِيلَ
إِنِّي رَبِّ قَالَتْ^ط قَوَارِيرَ مِنْ مُمْرَدٍ صَرْحُ إِنَّهُ قَالَ^ت سَأَقِيهَا عَنْ
الْعَالَمِينَ رَبِّ لِلَّهِ سُلَيْمَانَ مَعَ وَأَسْلَمْتُ نَفْسِي ظَلَمْتُ

*Artinya : Dikatakan kepadanya “Masuklah kedalam istana”, Maka
tatkala ia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan
disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, “Sesungguhnya ia
adalah istana licin, terbuat dari kaca” Berkatalah Balqis, “Ya Tuhanku,
sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah
diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan Semesta Alam”. (QS An-Naml
: 44)*

Demikianah Al-Qur’an bercerita tentang kepemimpinan perempuan
yang diilustrasikan oleh kepemimpinan Ratu Balqis dalam memimpin Negeri
Saba’. Dengan kecemerlangan, keluasan berpikir, ketajaman pandangan
dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, serta strategi politik yang
baik. Bahkan dalam mengambil keputusan sekalipun Ratu Balqis masih
menyempatkan untuk bermusyawarah dengan para rombongannya untuk
mengambil keputusan mengahdapi Nabi Sulaiman dan pasukannya. Karena
disamping itu Ratu Balqis masih memikirkan kepentingan rakyatnya.

Dengan melalui utusan dan hadiah yang dibawanya pulang, ia yakin
bahwa Sulaiman itu seorang Raja dan Nabi, maka tidaklah bijaksana
melawan Sulaiman dan kebenaran yang tentu dijamin Tuhan dengan

kemenangan, juga tidaklah bijaksana menghalangi kaum dan rakyatnya untuk menikmati kebenaran tersebut dengan berperang melawannya untuk mempertahankan kebathilan.⁶

Dr. kamal Jaudah mengatakan bahwa hadis Abi Bakrah di atas melarang perempuan sendirian menentukan urusan bangsanya, sesuai dengan asbab al-wurud hadis ini, yaitu telah diangkat anak perempuan Raja Kisrah untuk menjadi ratu atau raja pemimpin Persia. Sudah diketahui, bahwa sebagian besar raja-raja pada masa itu, kekuasaannya hanya ditangan sendiri dan dictator, hanya ia sendiri yang menetapkan urusan rakyat dan negerinya, ketetapanya tidak boleh digugat.⁷

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa kaum perempuan berhak memimpin suatu negara (presiden atau perdana menteri), sebagaimana halnya kaum laki-laki, bila mereka memiliki kriteria persyaratan sebagai pemimpin. Jadi kalau hadis Abi Bakrah di atas mengatakan bahwa tidak bahagia suatu kaum yang mengangkat kepemimpinan mereka seorang perempuan, Al-Qur'an justru menyebutkan sebaliknya, Al-Qur'an telah menceritakan sebagaimana kepemimpinan Ratu Balqis yang dapat memimpin negerinya dengan baik dan sangat memperhatikan kemaslahatan rakyatnya.

B. Peran Perempuan dalam Dunia Politik

⁶ Umam, Chatibul. *Kajian ayat-ayat Al-Qur'an tentang Perempuan*. (Jakarta : P3M IAIN Syarif Hidayatullah, 1996). Hal. 73-74.

⁷ Jaudah, Kamal. *Wazhifah Al-Mar'ah Fi Nazhar Al-Islam*, (Al-Qahirah : Dar al-Hady, 1440 H/1980M), hal. 141.

Kata politik berasal dari bahasa Inggris, yaitu *politics* yang berarti permainan politik.⁸ Sedangkan dalam bahasa Indonesia, politik diartikan pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti tata cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan dan sebagainya.⁹ Politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi. Kekuasaan merupakan suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama.¹⁰ Namun pada umumnya, dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmoni.¹¹

Sejak zaman dahulu perempuan mempunyai kedudukan dan peranan yang tinggi baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Persepsi tentang peran perempuan mengalami perubahan dan pengakuan yang menggembirakan. Perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta mempunyai kesempatan yang sama dengan pria untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional.¹² Dengan demikian tujuan pembangunan nasional untuk membina manusia seutuhnya dapat dicapai dengan peran serta perempuan secara utuh, sehingga mewujudkan warga negara yang sehat budaya. Masalah yang akan mewarnai peranan perempuan di Parlemen adalah kepemimpinan.

⁸ John M Echols Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1990), hal. 437

⁹ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal. 763.

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2007), hal. 14 16 *ibid.*, hal. 13.

¹¹ Mely, *Perempuan Indonesia...*, hal. 67.

¹² Mely, *Perempuan Indonesia...*, hal. 62.

Memimpin di arena politik dengan memimpin organisasi perempuan menuntut persyaratan yang berbeda. Memimpin organisasi politik meminta kekuatan berpikir “macho”, tanpa harus bertingkah seperti laki-laki. Latihan kepemimpinan yang tepat adalah organisasi sosial politik atau organisasi kemasyarakatan yang mengenal kebhinekaan. Dalam arena politik, kepemimpinan tidak selalu dimanifestasikan secara formal dalam bentuk jabatan-jabatan tersebut, sebab arena politik tidak begitu fanatik akan jenjang hierarki. Tidak sedikit anggota DPR yang dihormati karena kemampuannya yang sudah mencapai kualifikasi kepemimpinan, walaupun tidak menjabat salah satu pimpinan komisi dan badan lainnya hanya satu tahun, dan kadangkadang harus bergiliran, sedangkan kepemimpinan politik yang informal di Parlemen tumbuh dari orang-orang yang bisa menjadi sumber aspirasi, mampu mempengaruhi pandangan orang lain dan selalu siap serta mampu mengantarkan gagasan pemecahan masalah yang sesuai dengan garis politik partainya, dan mewakili kepentingan orang banyak.¹³

Mengenai kepemimpinan perempuan menurut Yusuf Qardawi berpendapat bahwa kepemimpinan kaum laki-laki atas kaum perempuan lebih cenderung kepada permasalahan kehidupan dalam keluarga, adapun kepemimpinan sebagian perempuan atas sebagian laki-laki di luar lingkup keluarga, tidak ada nash yang melarangnya. Dalam hal ini, menurutnya yang dilarang adalah kepemimpinan umum seorang perempuan atas kaum laki-laki.¹⁴ Kepemimpinan Aisyah dalam perang Jamal menjadi salah satu contoh menarik dalam memahami kesadaran dan partisipasi muslimah dalam bidang sosial politik. Islam telah memberikan ruang dan kesempatan peran yang memahami bagi perempuan muslimah

¹³ Mely, *Perempuan Indonesia...*, hal. 72.

¹⁴ Cahyadi Takariawan, *Fiqh Politik Perempuan*, (Solo: Era Intermedia, 2003), hal. 124.

untuk melakukan berbagai upaya kebolehan mereka menjadi pemimpin dalam berbagai urusan.

Kaum perempuan muslimah tidak boleh tinggal diam menyaksikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di tengah masyarakatnya.¹⁵ Seperti halnya kaum laki-laki, perempuan muslimah juga dituntut untuk peduli terhadap masalah-masalah sosial dan politik yang berkembang dalam masyarakat. Mereka dituntut untuk ambil bagian sesuai dengan batas-batas kemampuan dan kondisinya dalam membangun masyarakat melalui kegiatan amar ma'ruf nahi munkar, memberi nasehat atau dengan mendukung usaha-usaha yang positif dan menentang halhal negatif.¹⁶ Beberapa kejadian di zaman kenabian menunjukkan adanya kesadaran para muslimah sahabat Nabi Saw.

Dalam urusan sosial kemasyarakatan dan perpolitikan. Mereka bukanlah orang yang mengurung diri hingga tidak mengetahui perkembangan sosial dan politik yang ada di sekitarnya. Bahkan mereka adalah generasi yang memiliki kepekaan terhadap realitas kemasyarakatan. Sehingga mendorong mereka melakukan partisipasi dan memberikan kontribusi. Dilihat dalam realitas keseharian kita (zaman modern) mengenai adanya perempuan yang mampu memerankan fungsi kepemimpinan dalam berbagai sektor kehidupan menandakan adanya potensi yang sama antara laki-laki dan perempuan sebagaimana adanya laki-laki yang tidak mampu melaksanakan peran kepemimpinan. Artinya, laki-laki dan perempuan tidaklah bisa dikatakan memiliki kelebihan potensi kepemimpinan semata-mata dari jenis kelaminnya saja.¹⁷

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hal. 123.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 120

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hal. 122

Kesetaraan dan keadilan merupakan sesuatu yang diidam-idamkan oleh semua manusia termasuk perempuan. Sejarah mencatat bahwa perempuan telah mendapatkan diskriminasi atas hak hidup, hak emansipasi, bahkan hak-hak lainnya sebagai manusia. Banyak factor yang menyebabkan ini terjadi, yang pastinya seringkali perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan.

Secara sosiokultural, perempuan di Indonesia berada dalam posisi ketimpangan yang menyebabkan setidaknya apa yang telah digambarkan para tokoh. Laki-laki dan perempuan tidak hanya dibedakan dalam kelas sosial namun juga dibebankan dengan ketimpangan sosial dimasyarakat, secara spesifik perempuan memiliki keterbatasan ruang bahkan sangat minim akan sumberdaya materi, status sosial dan peluang dibandingkan dengan laki-laki. Perbedaan ini berada dalam ruang factor kelas, ras, pekerjaan, etnisitas, agama, pendidikan, nasionalitas, dll. Hal tersebut dibangun dalam masyarakat itu sendiri. Bukan karena faktor biologis atau bakat dan potensi yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan itu sendiri.¹⁸

Keterbatasan perempuan dalam aspek aksesibilitas Pendidikan, sumber daya, dan informasi ternyata sangat mempengaruhi perempuan dalam aksesibilitas didunia politik juga, meskipun secara kuantitas jumlah perempuan pertahun semakin meningkat, tetapi di kiprah dunia politik perempuan sangatlah rendah. Perempuan hanya terlihat sebagai obyek dan bahkan hanya *floating mass* saja. Aktifitas seperti ini sangat mempengaruhi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai kegiatan politik mulai dari area pemerintahan,

¹⁸ W, S Ani. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. (Jakarta: Kompas, 2004). Hal.12

partai dan partemen. Mengkaji partisipasi politik dalam konteks sosiologis tidak hanya dihitung dalam jumlah anggota parlemen, jumlah pejabat public, dan jumlah perempuan yang berkontestasi atau menduduki jabatan tersebut, tetapi juga keikutsertaan perempuan yang menghasilkan kreatifitas dan kegiatan-kegiatan yang cenderung meningkatkan kemampuan dan potensi perempuan dalam dunia politik yang lebih bermakna lagi.¹⁹

Perkembangan modernitas yang meletakkan akal dan rasio sebagai dasar dalam berpikir dan bertindak, seharusnya menjadi logika pula dalam menempatkan perempuan diposisi public atau domestic. Hal inilah yang menjadi dasar gerakan *Gender dan Development* dengan diterimanya konvensi global anti segala diskriminasi terhadap perempuan, usaha untuk menghapus diskriminasi Gender dilakukan dengan :

1. Mencantumkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan dan UUD mereka atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persamaan hak dan derajat antara laki-laki dan perempuan dimata hukum.
2. Membuat peraturan yang berkaitan dengan diskriminasi perempuan dari segala dimensi, termasuk politik.
3. Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas dasar bahwa laki-laki dan perempuan derajatnya sama dimata hukum, serta dipayungi oleh badan hukum yang sah secara konstitusional.

Dalam konvensi ini terlihat bahwa upaya penghapusan diskriminasi ditenkankan melalui upaya reformasi hukum dan undang-undang yang berlaku dimasing-masing negara.²⁰

¹⁹ Ibid, 17

²⁰ W, S Ani. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. (Jakarta: Kompas, 2004). Hal.19

a. Pendekatan Affirmatif Action dalam Pemilu

Salah satu barometer yang dipakai berapa banyak dan berapa persen tentang kesetaraan perempuan didalam dunia politik adalah dengan melihat persentasi perempuan yang duduk dalam kursi parlemen tersebut. Semakin besar jumlah perempuan diletakkan sejajar dengan laki-laki dikursi parlemen, hal ini pulalah yang menjadi agenda politik dalam *Gender and Development* (GAD) dengan, (1) hak untuk memilih dan dipilih, (2) berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implemntasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintah disegala tingkat, (3) berpastisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non-pemerintahan yang berhubungan dengan kehidupan politik dan negara. Dengan agenda tersebut akan memperlihatkan goal kepemimpinan perempuan dalam ruang lingkup keterlibatan dalam parlemen.

Persentase perempuan yang senantiasa menurun dari pemilu ke pemilu, mulai Pemilu tahun 1992 menembus 12,5% Pemilu 1997 turun 11,5% dan meresot tajam pada Pemilu tahun 1999 menjadi 9% rupanya menerobos dan menguatkan gebrakan Gerakan perempuan melalui Undang-Undang. Pendekatan yang dilakukan kovenssi GAD bukanlah suatu Gerakan yang baru, namun memberikan dampak baik terhadap perempuan bahkan laki-laki itu sendiri. Langkah hukun yang paling besar paska Pemilu 1999 adalah dengan *affirmative action*. Langkah salah satu Langkah pro-aktif untuk menghapuskan secara perlahan diskriminatif yang berbasis gender dan ras. Dalam praktik pelaksanaannya *affirmative action* tidak selalu dikaitkan dengan kouta, tekanan pada *affirmative action* ini pada *opportunity* (kesempatan), sedangkan kouta seringkali diartikan sebagai pemaksaan jumlah tertentu atau persentase tertentu bagi kelompok tertentu termasuk perempuan.

Dengan dalih upaya mempersempit *gender gap* dalam representasi politik, kebijakan kuota seringkali dipilih. Dan inilah yang terjadi pada Pemilu 2004, dimana Undang-Undang No 12 tahun 2003 pasal 65 (1) menyebutkan “Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperlihatkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”.²¹

Berikut beberapa table yang berkaitan dengan kuantitas perempuan dalam kusri parlemen :

Tabel 1 Sepuluh Negara di Dunia dengan Tingkat Partisipasi Perempuan Tertinggi di Dunia Tahun 2009

NO	Negara	Persentase
1.	Rwanda	48,8
2.	Swedia	47,3
3.	Finlandia	42
4.	Kostarika	38,6
5.	Denmark	38
6.	Norwegia	37,4
7.	Belanda	36,7
8.	Kuba	35
9.	Spanyol	36
10.	Mozambik	34,8

²¹ W, S Ani. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. (Jakarta: Kompas, 2004). Hal.23

sumber. Center For Electoral Reform (CETRO), 2009

Sebagaimana ditegaskan dalam Tujuan Pembangunan Milenium (*The Millenium Development Goals*), keterwakilan perempuan terkait pengambilan keputusan merupakan hak yang sangat mendasar dalam kehidupan politik dan bagian terpenting dari kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan²². Dalam konteks itu, perempuan juga harus aktif berpartisipasi menentukan agenda pembangunan. Dengan demikian, perempuan kerap menemukan lingkungan kurang bersahabat yang merintang jalan mereka tatkala memasuki dunia politik. Data mengenai rendahnya angka partisipasi perempuan diberbagai daerah di Indonesia, baik sebagai penyusun maupun pengambil keputusan, menunjukkan masih banyaknya kendala yang harus dihadapi perempuan.²³ Bahkan perempuan Indonesia tidak masuk dalam daftar sepuluh negara tertinggi di dunia menyangkut tingkat keterwakilan perempuan di parlemen (lihat tabel 1).

Tabel 1 menunjukkan sepuluh negara dengan tingkat partisipasi tertinggi perempuan legislator berada di Eropa, Amerika, dan Afrika. Tidak satu pun perempuan anggota parlemen dari negara-negara Asia tercantum dalam tabel tersebut. Menurut Najma Chowdhury, tingkat keterwakilan perempuan di parlemen sangat ditentukan oleh faktor budaya.²⁴ Namun demikian, bukan berarti angka partisipasi perempuan dinegara-negara Asia rendah. Sebagai contoh, angka partisipasi perempuan diparlemen India dewasa ini tampak mengalami peningkatan cukup pesat. Bahkan, proporsinya telah mencapai 30 persen.²⁵

²² Lihat, "Promte Gender Equality and Empower Women", Millennium Development Goals, dalam http://www.developmentgoals.org/Gender_Equality.htm.

²³ Partini, *Bias Gender dalam Birokrasi*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013). Hal,72.

²⁴ Chowdhury, najma. *Women and Politics Worldwide* (New Haven : Yale University Press, 1994), hal. 3-24.

²⁵ Ibid, 361-379



Tabel 2 Perempuan Indonesia dalam Lembaga-lembaga Formal, tahun 2010

<i>LEMBAGA</i>	<i>PEREMPUAN</i>		<i>LAKI-LAKI</i>	
	<i>Jumlah</i>	<i>persentase</i>	<i>Jumlah</i>	<i>persentase</i>
Gubernur	1	3	32	97
Bupati/Wali Kota	10	2,27	430	97,73
Kepala Desa	3.092	3,92	75.983	96,06
Anggota Kabinet	5	14,71	31	85,29
Komisi Nasional*	18	25,35	53	74,65
KPUD Provinsi**	32	19	135	81
Hakim di Pengadilan**	752	24	2.638	76
Hakim di PA**	675	19,91	2.715	80,09
Jaksa**	988	29,17	1.650	70,83
Pegawai Kejaksaan**	1.133	33,43	2.257	66,57

Pejabat Kepolisian**	13.623	35	375.857	96,50
----------------------	--------	----	---------	-------

sumber: Data diolah dari berbagai sumber (KPU, UNDP Indonesia, Puskapol UI).

*Di sini, Komisi Nasional mencakup tiga belas komisi di tingkat nasional.

** Jumlah secara nasional

Sebagaimana tampak pada tabel 2 ada peningkatan partisipasi perempuan di berbagai bidang. Banyak perempuan Indonesia yang memasuki sektor public, namun tidak ada yang memegang posisi eksekutif dan manajerial.²⁶ Pada akhir 2009, hanya satu dari 33 gubernur yang terpilih perempuan (Gubernur Provinsi Banten) dan ada satu orang yang terpilih sebagai Wakil Gubernur (Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah).²⁷ Pada tahun yang sama, dari 440 kabupaten/kota hanya ada 10 bupati/wali kota perempuan (2,27 persen). Saat ini, perempuan hanya 18 persen dari jumlah total wakil rakyat di DPR-RI. Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tampak adanya peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di DPR dan juga DPRD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Gerakan perempuan Indonesia memiliki keterlibatan aktif dibidang politik, namun masih terdapat kesenjangan dalam hal partisipasi dan keterwakilan perempuan di struktur

²⁶ UNDP Indonesia, *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah: Makalah Kebijakan* (Jakarta: UNDP Indonesia, Mei 2010); Pusakol UI, "Representasi Minus Akuntabilitas: Analisis Sistem Pemilu", dalam konferensi Pers, Hotel Bidakara, Jakarta, 16 Desember 2019. Hal, 145

²⁷ UNDP Indonesia, *op.cit.*

politik formal. Mereka belum terwakili secara setara dilembaga legislative nasional sejak Pemilu 1955, Ketika perempuan menduduki 5,9 persen kursi diparlemen.²⁸ Walaupun ada kecenderungan meningkat dalam hal keterwakilan perempuan sejak 1971. Pada pemilu 1977, jumlah perempuan terpilih melorot dari 7,8 persen menjadi 6,3 persen jika dibandingkan dengan Pemilu 1971 dan Kembali mengaami penurunan pada Pemilu 1999 menjadi 9 persen. Walaupun demikian, peningkatan keterwakilan perempuan di DPR-RI pada pemilu 2004 dan Pemilu 2009 masing-masing sebesar 10,8 persen dan 18 persen substantif. Kecenderungan meningkat dalam hal keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dari 22,6 persen pada Pemilu 2004 menjadi 26,5 persen dan pemilu 2009 juga cukup menggembirakan.

Dalam komisi-komisi di DPR, perempuan cenderung memegang jabatan-jabatan yang secara tradisi dilihat sebagai jabatan “lembut”. Disebut “lembut” karena kentalnya asosiasi jabatan tersebut dengan peran tradisional perempuan. Keterwakilan perempuan dalam komisi-komisi yang berwenang membahas masalah ekonomi dan politik, khususnya keterwakilan politik dan kemiskinan, sangat penting mengingat komisi merupakan salah satu institusi penentu program dan anggaran eksekutif. Karena itu, perjuangan perempuan tidak sekadar masuk dan duduk menjadi anggota parlemen, melainkan bagaimana menjadikan perempuan memiliki arti serta memberi kontribusi pada perubahan kebijakan agar tercapai legislasi yang responsif gender.²⁹ Kurangnya keterwakilan perempuan di bidang politik, antara lain, disebabkan oleh kondisi budaya patriarkal yang tidak diimbangi kemudahan akses dalam bentuk tindakan afirmatif bagi perempuan. Pasal 27 UUD 1945

²⁸ UNDP Indonesia, *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah: Makalah Kebijakan* (Jakarta: UNDP Indonesia, Mei 2010); Pusakol UI, “Representasi Minus Akuntabilitas: Analisis Sistem Pemilu”, dalam konferensi Pers, Hotel Bidakara, Jakarta, 16 Desember 2019. Hal, 178

²⁹ Ibid., hal. 21

sendiri menegaskan bahwa, “ semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sedangkan pasal 28 menjamin, “kebebasan berkumpul dan berserikat, dan kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan”. Walaupun demikian, dalam kondisi tertentu, perempuan menghadapi sejumlah kendala untuk mensejajarkan diri dengan laki-laki dalam berbagai bidang.³⁰

C. Pandangan Islam terhadap Gerakan Feminisme

Feminisme dalam kajian ini membuka ruang bagi sebuah kesadaran yang kemudian melahirkan gerakan yang pada intinya membicarakan eksistensi perempuan dalam wilayah budaya Erika Septiana 328 Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam (culture). Hal ini juga merupakan reaksi masyarakat terhadap suatu pergeseran pemahaman yang terjadi baik itu memiliki kecenderungan dalam kancan positif bagi kehidupan masa depannya atau malah sebaliknya. Kondisi kehidupan perempuan pada masa lalu (baik dalam sejarah Islam maupun barat) memiliki catatan suram yang berdampak pada kualitas perlakuan masyarakat terhadap keberadaan perempuan di lingkungannya.

Dalam tradisi Yahudi perempuan berpredikat sebagai pelayan, sehingga ia tidak memiliki hak suara untuk menentukan nasibnya, semua berada di tangan kaum laki-laki. Bahkan ayahnya dapat menjualnya tanpa persetujuan dari dirinya. Sementara dalam ajaran Budha mereka dianggap kotor dan suka menggoda laki-laki yang ingin menjadi suci. Laki-laki dianggap tidak memiliki kesalahan meskipun mereka jatuh dalam godaan tersebut.

³⁰ UNDP Indonesia, *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah: Makalah Kebijakan* (Jakarta: UNDP Indonesia, Mei 2010); Pusakol UI, “Representasi Minus Akuntabilitas: Analisis Sistem Pemilu”, dalam konferensi Pers, Hotel Bidakara, Jakarta, 16 Desember 2019. Hal, 167

Begitu pula dalam tradisi Yunani dan Romawi, perempuan tidak memiliki hak untuk menggunakan, memiliki, dan mewarisi harta, dan juga mereka dilarang untuk memerintah, derajat mereka-pun disamakan dengan harta yang dapat diperjual-belikan dan dipergunakan sewenang-wenang oleh kaum lelaki.

Termasuk pula perlakuan yang berawal dari pemahaman keliru yang diberikan oleh kaum Yahudi dan Nasrani yang dengan jelas menisbahkan seluruh kesalahan turunya Adam dan Hawa dari surga disebabkan oleh keteledoran Hawa yang tergoda oleh rayuan Iblis, sehingga mereka terusir dari kehidupan surga yang dilingkupi dengan kenikmatan. Sehingga jelas bagi perempuan, mereka diharuskan untuk terus memanggul kesalahan abadi tersebut. Hal inilah yang sampai kini masih melingkupi pemikiran dan sekaligus membuka gerbang kritik yang mendasari gugatan feminis barat terhadap status perempuan dalam agama ini. Relasi yang terbentuk antara kaum pria dan perempuan, dalam kurun waktu terakhir disikapi oleh para feminis dengan beberapa teori, diantaranya:

1. Feminis Liberal, yaitu gerakan yang medasarkan pemikirannya semua adalah manusia, diciptakan seimbang dan serasi dan mestinya tidak terjadi penindasan antar satu dengan lainnya. Aliran pemikiran ini mengakui adanya kekhususan-kekhususan pada kedua belah pihak. Tokoh dalam aliran ini antara lain Feminisme Dalam Pandangan Islam: Margaet Fuller (1810-1850), Harriet Martineau (1802-1876), Anglina Grimke (1792-1873), dan Susan Anthony (1820-1906).
2. Feminis Marxis-Sosialis, yaitu aliran yang berupaya menghilangkan struktur kelas dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan isu bahwa ketimpangan peran antara kedua jenis kelamin itu sesungguhnya lebih disebabkan oleh faktor budaya. Aliran ini menolak anggapan tradisonal dan para teolog bahwa

perempuan lebih rendah dari kaum laki-laki. Adapun tokoh-tokohnya antara lain Clara Zetkin (1857-1933) dan Rosa Luxemburg (1871-1919).

3. Feminis Radikal, aliran ini mengupayakan pembenaran rasional yang mengungkapkan fakta bahwa laki-laki adalah masalah bagi perempuan. Artinya analisa yang dilakukan oleh kelompok ini lebih terkonsentrasi pada masalah seksual. Karena menurut mereka kaum pria hanya ingin mengeksploitasi alat reproduksi perempuan dengan menggunakan berbagai dalih. Tokoh yang menyuarakan pendapat ini tidak terdeteksi secara jelas.

Berbagai pemikiran dan perjuangan yang muncul kemudian merupakan refleksi dari fenomena buruk yang dihadapi komunitas gender, sehingga tuntutan mereka untuk memperoleh persamaan kedudukan dan kemerdekaan dalam memenuhi hajat hidupnya dipandang sebagai sebuah perlawanan bagi kaum yang tidak selaras dengan kehendak mereka. Terlebih lagi bahwa gerakan seperti ini digolongkan sebagai ancaman oleh pihak yang berkuasa sehingga aktifitas apapun yang muncul dalam komunitas ini, akan dihentikan, bahkan dengan pemaksaan dan kekerasan. Hakekat kemerdekaan seorang perempuan adalah keinginan mereka untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, artinya bias gender yang ada merupakan ekspresi dari keterkukungan pada asumsi kelemahan mereka secara fisik,

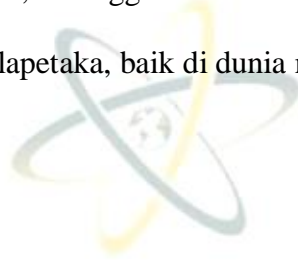
Hal inilah yang senantiasa membuat perempuan seolah dipinggirkan. Namun apabila dilihat dari segi kemampuan intelegensi dan kecakapan lainnya, perempuan tidak mempunyai sedikitpun kekurangan jika dibandingkan dengan pria. Kecakapan intelektual perempuan akan sangat dibutuhkan dalam dinamika masyarakat kota yang siklus

kehidupannya bersifat pada pembangunan fisik dan psikis sebuah Negara,³¹ artinya kecakapan perempuan dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan dan sebagainya mempunyai peran yang tidak kecil. Sementara di pedesaan, perempuan dapat berperan penting dalam aktifitas pertanian atau perikanan, dengan tidak segan mereka dapat mengaplikasikan kemampuan yang telah tertempa sebelumnya dengan turun langsung ke areal pertanian yang ada, atau menghadirkan makanan yang layak bagi para suami (lakilaki) yang telah bekerja seharian di ladangnya. Realitas ini tentunya membutuhkan analisa sosiologis sehingga penempatan peran gender dalam kehidupan sosial ini menjadi lebih jelas.

Hal ini tidak akan terjadi dalam kehidupan sosialnya di tengah pemahaman kaum primitif yang lebih bersifat egalitarian sehingga lebih menegakkan persamaan hak hidup dengan kaum perempuan. Sementara pada kalangan aristokrat misalnya, perempuan dijadikan sebagai boneka hiasan rumah, yang siap digunakan jika ia diperlukan. Secara umum ia tidak dapat melibatkan suaranya dalam pengambilan keputusan rumah tangga, sementara pada masyarakat kalangan bawah, perempuan merupakan objek eksploitasi yang terus tertindas, sehingga kedudukannya benar-benar menjadi subordinatif dalam kehidupan sosial masa lalu. Dalam pola pemikiran modern, perempuan telah mendapatkan tempat yang lebih baik dalam siklus kehidupan sosialnya. Kebebasan menentukan jalan hidup menjadi hal yang sudah tidak sulit lagi untuk diperoleh. Hal ini juga yang kemudian menjadi sorotan Said Nursi dalam risalah kedua puluh empatnya tersebut.

³¹ Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif al-Quran*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 78

Kekhawatirannya atas sikap perempuan yang kurang dapat mengontrol dirinya, membuat ia harus mengingatkan mereka mengenai fitnah terhadap perempuan di akhir zaman. Beliau mengingatkan untuk tidak menggunakan kecantikan yang kemudian akan menuai kesalahan dan dosa, sehingga semua kebanggaannya itu akan berubah menjadi keburukan dan sumber malapetaka, baik di dunia maupun di akhirat.³²



³² Bediuzzaman Nursi, Barla Lahikasi, (Istanbul: Nesil Yayinlari, 2003), h. 374.